

Paradoks Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan *Urban Residential*: Analisis Kesenjangan PDRB Per Kapita Kota Bekasi

Asep Pipin Hanapi*¹

¹Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: asephanapi79@student.esaunggul.ac.id

***Corresponding Author**

Article Info

Article history:

Received: April 2026

Revised: May 2026

Accepted: June 2026

Keywords:

Economic Paradox

Regional Agglomeration

Per Capita GRDP

Income Inequality

Urban Residential

ABSTRACT

The macroeconomic dynamics of capital city buffer zones often present an anomaly between aggregate growth and the equitable distribution of individual welfare. This study examines the post-pandemic economic performance of Bekasi City, where the Economic Growth Rate in 2025 reached 5.39%, surpassing the averages of West Java Province (5.32%) and the national level (5.11%). However, this impressive expansion is overshadowed by stagnation in per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), which has plateaued at around IDR 52.51 million, significantly lagging the provincial average of IDR 59.87 million. Employing a descriptive quantitative approach based on panel and time-series data (2019-2025), this study unravels the structural roots of this disparity. The analysis indicates that the per capita gap is associated with Bekasi's characteristics as an urban residential area, as reflected in population growth outpacing the increase in per capita GRDP during the observation period. The surge in commuter migration, which boosted the population to 2.64 million, acts as a cannibalizing factor against the mathematical income ratio. Furthermore, the dominance of capital-intensive sectors such as the Manufacturing Industry (32.48%) induces capital flight towards the core agglomeration pole in Jakarta. Despite the depressed per capita value, the sociological condition dominated by minimum-wage working classes surprisingly yields a positive impact on income equality, evidenced by Bekasi City's Gini Index (0.407), which is more inclusive than the provincial average (0.416). These findings provide policy implications on the necessity of reorienting economic success metrics from merely pursuing GRDP towards stabilizing inequality and strengthening the local MSME sector.



1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah pada hakikatnya bukan sekadar memacu angka produksi barang dan jasa, melainkan memastikan terdistribusinya nilai tambah tersebut kepada masyarakat secara berkeadilan. Keberhasilan rancang bangun arsitektur perekonomian suatu wilayah senantiasa diukur melalui dua pilar utama: besaran agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan rasio PDRB per kapita. PDRB agregat mengilustrasikan seberapa kencang roda ekonomi berputar dalam suatu teritorial, sedangkan PDRB per kapita diposisikan sebagai proksi matematis untuk menakar taraf kesejahteraan individu penduduknya. Dalam pelbagai literatur ekonomi regional misalnya [1], ekspansi PDRB secara teoretis diharapkan mampu mendorong konvergensi dan menekan ketimpangan pendapatan. Namun,

realitas empiris di lapangan memperlihatkan determinan disparitas yang kompleks, di mana raihan laju agregat tidak senantiasa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan individual.

Kondisi paradoks ini mengemuka secara tajam apabila lokus pengamatan diarahkan pada kawasan penyangga di sekitar pusat aglomerasi raksasa. Kota Bekasi, yang menduduki posisi strategis sebagai salah satu simpul terpadat dalam koridor metropolitan Jabodetabek, merupakan contoh empiris yang sangat relevan. Transformasi tata ruang dan demografi kawasan ini amat dipengaruhi oleh masifnya industrialisasi dan pengembangan permukiman satelit [2]. Jika mengidentifikasi rekam jejak makroekonominya, wilayah ini memperlihatkan daya resiliensi yang mumpuni pascapandemi COVID-19. Laporan Badan Pusat Statistik mengonfirmasi bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi pada estimasi akhir 2025 menembus level 5,39% [3]. Angka ini menunjukkan kinerja superior karena sukses melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Barat yang berada di posisi 5,32% [4]. Fondasi utama dari ketangguhan ini berpijak pada deru sektor industri pengolahan. Fenomena tersebut koheren dengan temuan [5], yang menggarisbawahi bahwa aglomerasi industri manufaktur berskala masif merupakan pendorong mutlak LPE di berbagai wilayah Pulau Jawa.

Kendati demikian, torehan angka makro yang terkesan gemilang tersebut memunculkan suatu anomali ketika dibenturkan dengan perolehan pendapatan rata-rata penduduknya. Data statistik memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kota Bekasi pada tahun 2025 tertahan di kisaran Rp52,51 juta, sebuah postur yang secara mengejutkan tertinggal dari rerata PDRB per kapita tingkat provinsi sebesar Rp59,87 juta. Hal ini memantik suatu ruang diskursus akademis yang mendesak untuk diurai: Mengapa sebuah kota yang menjadi basis manufaktur raksasa justru menyisakan porsi kesejahteraan agregat perorangan yang lebih marjinal dibandingkan dengan rata-rata wilayah di sekitarnya?

Aglomerasi ekonomi tercipta berkat interaksi spasial yang memicu pemusatan aktivitas industri dan komersial di satu titik geografis. Secara konseptual, pemusatan ini menunjukkan kecenderungan efisiensi biaya logistik, limpahan pengetahuan (*knowledge spillovers*), dan kemudahan rantai pasok. Beberapa studi mengonfirmasi bahwa aglomerasi memberikan dampak positif nyata dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah [6]; [7]. Walau demikian, pemusatan spasial yang terjadi secara hiperbolis tanpa diimbangi pemerataan utilitas dasar justru rentan membelah jurang ketimpangan antarkawasan [8]; [9]. Dalam konteks kota satelit, aglomerasi berpeluang mengeksploitasi tata ruang guna memfasilitasi sektor padat modal, namun tidak memberikan transformasi riil terhadap kapasitas finansial masyarakat pekerja di sekelilingnya.

Paradigma *New Economic Geography* (Geografi Ekonomi Baru) yang dirumuskan [10] mengartikulasikan proses segregasi wilayah menjadi kawasan pusat (*core*) dan kawasan pinggiran (*periphery*). Apabila kerangka ini dilekatkan pada interaksi antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi, terlihat pola eksodus keuntungan komersial yang amat presisi. Kendati barang dan jasa fisik diproduksi massal di pabrik yang beroperasi di Bekasi, mayoritas margin keuntungannya terakumulasi pada struktur pembukuan kantor pusat korporasi yang berdomisili di ibu kota negara. Observasi terdahulu [11]; [12] mengindikasikan preseden serupa; di mana meluasnya lahan perkotaan dan perbaikan infrastruktur di lingkaran pinggiran nyatanya gagal mendistribusikan PDRB per kapita akibat deras arus pelarian modal (*capital flight*) menuju sentra pengendali.

Dalam penelitian ini, *urban residential trap* digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan fenomena ketika suatu kota penyangga mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan PDRB per kapita, sehingga kesejahteraan rata-rata penduduk relatif tertinggal. Istilah ini bukan merupakan teori baku dalam literatur ekonomi regional, melainkan konsep analitis yang dikembangkan berdasarkan sintesis teori aglomerasi, *New Economic Geography*, dan dinamika kota penyangga metropolitan. Oleh karena itu, konsep tersebut digunakan sebagai dasar interpretasi terhadap hasil analisis deskriptif, bukan sebagai variabel yang diuji secara statistik.

Teori migrasi neoklasik menegaskan bahwa probabilitas mendapat upah yang lebih layak selalu memacu arus urbanisasi menuju zona konsolidasi industri [13]. Khusus di Kota Bekasi, modernisasi infrastruktur rel seperti KRL Commuter Line dan LRT meledakkan tren okupansi perumahan komersial kelas menengah ke bawah [14]. Integrasi transportasi ini memfasilitasi jutaan pekerja untuk bermukim di Bekasi, namun mencari nafkah di Jakarta. Kehadiran komuter ini merevolusi struktur demografi secara radikal, menjadikan korelasi dinamis antara kepadatan penduduk dan nilai PDRB per kapita merosot tajam [15]. Pembengkakan volume komuter berpotensi memengaruhi penyebut pembagi pada ekuasi matematis kekayaan wilayah menjadi terlampau gemuk, sehingga secara teknis mereduksi nilai nominal pendapatan rata-rata individu.

Tinjauan atas pelbagai kajian terdahulu menunjukkan tendensi para akademisi untuk menyoroti pengaruh industrialisasi secara tunggal, yakni kapasitasnya memompa output regional dan membuka lapangan kerja [16]; [17]. Sejumlah riset empiris juga acap kali memusatkan perhatian pada peran sektor basis dalam menekan disparitas antarwilayah [18]. Akan tetapi, eksplorasi teoritis yang secara lugas membenturkan kemajuan makro industri dengan beban demografis (*population burden*)-sebagai residu perembetan tata ruang kota (*urban sprawl*) yang beralih fungsi menjadi pusat hunian kaum komuter — masih terbilang langka [19]. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan PDRB per kapita Kota Bekasi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2025 melalui analisis perkembangan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk akibat karakter Kota Bekasi sebagai kawasan hunian (*urban residential*) dibahas sebagai penjelas terhadap fenomena kesenjangan PDRB per kapita, bukan sebagai variabel penelitian yang diuji secara tersendiri.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis data runtun waktu (*time-series*) yang bersifat komparatif [20];[21]. Objek penelitian adalah Kota Bekasi dengan pembandingan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia selama periode 2019–2025. Pemilihan periode tersebut bertujuan menggambarkan kondisi sebelum pandemi, saat pandemi, serta masa pemulihan ekonomi pascapandemi, sehingga perkembangan indikator ekonomi dapat diamati secara lebih utuh. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, BPS Provinsi Jawa Barat, dan BPS Indonesia.

Variabel yang dianalisis meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diverifikasi silang (*cross-check*) menggunakan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, BPS Provinsi Jawa Barat, dan BPS Indonesia. Verifikasi dilakukan dengan memastikan konsistensi antara nilai PDRB, jumlah penduduk, PDRB per kapita, serta status data (angka sementara maupun angka sangat sementara) sehingga seluruh indikator yang digunakan berasal dari periode dan klasifikasi data yang sama. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif melalui penyajian tabel dan analisis tren antarwaktu. Kesenjangan PDRB per kapita dihitung menggunakan selisih antara PDRB per kapita Kota Bekasi dengan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

$$\text{Kesenjangan PDRB per Kapita} = \text{PDRB per Kapita Kota Bekasi} - \text{PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat}$$

Nilai negatif menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kota Bekasi berada di bawah rata-rata provinsi, sedangkan nilai positif menunjukkan kondisi sebaliknya. Selanjutnya dilakukan analisis tren terhadap perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita untuk menginterpretasikan dinamika kesenjangan selama periode pengamatan [22];[23].

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1. Pemulihan Resiliensi vs Laju Demografi

Menyusul fase resesi, fondasi makroekonomi Kota Bekasi mendemonstrasikan kapasitas lenting (*resilience*) yang amat kokoh. Tabel 1 menarasikan pergerakan LPE daerah yang lambat laun memimpin barisan pertumbuhan di tingkat regional. Merujuk kompilasi tersebut, trajektori LPE Kota Bekasi tahun 2025 tampil superior pada kisaran 5,39%. Pencapaian ini menegaskan hegemoni wilayah manufaktur atas rerata Jawa Barat (5,32%). Kendati demikian, momentum ekspansif ini tidak serta merta meringankan beban tanggungan wilayah. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bekasi selama periode pengamatan menunjukkan adanya peningkatan tekanan demografis terhadap pembagian nilai PDRB per kapita. Penelitian ini tidak mengidentifikasi secara langsung sumber pertumbuhan penduduk tersebut, baik yang berasal dari migrasi masuk, mobilitas komuter, maupun pertumbuhan alami penduduk. Oleh

karena itu, hasil penelitian hanya menunjukkan adanya keterkaitan deskriptif antara meningkatnya jumlah penduduk dan masih rendahnya PDRB per kapita dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat [24]; [25].

Tabel 1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE dalam %)

Tahun	Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2019	5,41	5,02	5,02
2020	-2,58	-2,52	-2,07
2021	3,22	3,74	3,70
2022	4,96	5,45	5,31
2023	5,43	5,00	5,05
2024*	5,19	4,95	5,03
2025**	5,39	5,32	5,11

3.2. Efek *Urban Residential Trap* dan Defisit Agregat

Dalam penelitian ini, *urban residential trap* diinterpretasikan sebagai kondisi ketika pertumbuhan jumlah penduduk berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan PDRB per kapita, sehingga rata-rata pendapatan per penduduk relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah pembanding. Interpretasi tersebut didasarkan pada pola perkembangan jumlah penduduk dan PDRB per kapita selama periode 2019–2025, tanpa menguji hubungan sebab-akibat secara statistik. Hal ini melahirkan apa yang disebut defisit tersembunyi, tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 2. Komparasi PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)

Tahun	Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat	Defisit Wilayah
2019	33,34	43,31	(9,97)
2020	38,00	43,24	(5,24)
2021	39,48	45,23	(5,75)
2022	42,29	49,14	(6,85)
2023	45,28	52,65	(7,37)
2024*	48,92	56,08	(7,16)
2025**	52,51	59,87	(7,36)

Nilai PDRB per kapita pada Tabel 2 dihitung berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan jumlah penduduk pertengahan tahun yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Seluruh angka telah disesuaikan menggunakan publikasi BPS pada tahun yang sama. Celah PDRB per kapita sebesar Rp7,36 juta dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa rata-rata output ekonomi per penduduk Kota Bekasi masih berada di bawah rata-rata provinsi. Perlu ditegaskan bahwa PDRB per kapita merupakan indikator rata-rata aktivitas ekonomi per penduduk dan tidak dapat disamakan secara langsung dengan pendapatan individu, daya beli masyarakat, maupun jumlah pendapatan yang benar-benar diterima setiap rumah tangga. Oleh karena itu, temuan ini lebih tepat diinterpretasikan sebagai adanya kesenjangan pada rata-rata output ekonomi wilayah, bukan sebagai bukti bahwa tingkat kesejahteraan atau pendapatan masyarakat Kota Bekasi secara langsung lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat Provinsi Jawa Barat [26]. Hasil analisis deskriptif mengidentifikasi dua patologi struktural utama:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, peningkatan jumlah penduduk bertepatan dengan masih adanya kesenjangan PDRB per kapita antara Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, penelitian ini tidak memiliki data mengenai migrasi masuk maupun jumlah komuter, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk tersebut secara langsung disebabkan oleh mobilitas pekerja ke Jakarta. Selain itu, dominasi sektor industri pengolahan dapat menjadi salah satu karakteristik struktur ekonomi Kota Bekasi yang memerlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kontribusinya terhadap pembentukan PDRB per kapita [27].
2. Struktur Industri dan Dugaan Leakage Ekonomi. Struktur ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2025 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dominasi sektor tersebut tidak dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai terjadinya *capital flight* atau kebocoran keuntungan ke wilayah lain. Penelitian ini tidak

menggunakan data mengenai kepemilikan perusahaan, lokasi kantor pusat, maupun aliran laba antardaerah, sehingga belum dapat menunjukkan indikasi secara empiris bahwa keuntungan industri keluar dari Kota Bekasi. Oleh karena itu, kemungkinan adanya *economic leakage* hanya diposisikan sebagai dugaan teoritis yang merujuk pada konsep *New Economic Geography*, yang menyatakan bahwa wilayah pinggiran berpotensi mengalami konsentrasi aktivitas produksi sementara sebagian manfaat ekonomi terakumulasi di wilayah pusat.

3.3. Anomali Positif: Kestabilan Gini Ratio

Sebuah ironi yang bersifat kontradiktif namun mendamaikan, timbul dari runtuhnya peringkat rasio per kapita tersebut. Kelemahan pendapatan per individu justru membidani lahirnya keadilan sosial (*equity*) di sektor pemerataan lapisan masyarakat, sebagaimana tergambar lewat Tabel 3.

Tabel 3. Komparasi Indeks Gini Wilayah (2019-2025)

Tahun	Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2019	0,352	0,398	0,380
2020	0,352	0,398	0,385
2021	0,401	0,411	0,381
2022	0,441	0,412	0,381
2023	0,414	0,425	0,388
2024*	0,404	0,428	0,381
2025**	0,407	0,416	0,363

Tabel 3 menunjukkan bahwa Indeks Gini Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar 0,407, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 0,416. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di Kota Bekasi relatif tidak lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi selama periode pengamatan. Namun demikian, perbedaan nilai Indeks Gini tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya homogenitas kelas pekerja, dominasi kelompok tertentu dalam struktur sosial ekonomi, maupun tidak adanya kelompok pemilik modal di Kota Bekasi. Penelitian ini tidak menggunakan data mengenai distribusi pengeluaran rumah tangga, struktur pekerjaan, tingkat upah, maupun distribusi pendapatan berdasarkan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian hanya menunjukkan kecenderungan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Bekasi relatif sebanding dengan kondisi Provinsi Jawa Barat, sedangkan penjelasan mengenai struktur sosial ekonomi memerlukan penelitian lanjutan dengan data mikro rumah tangga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data tahun 2019–2025, Kota Bekasi menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat, namun kondisi tersebut belum diikuti oleh peningkatan PDRB per kapita yang mampu menyamai rata-rata provinsi. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan PDRB per kapita antara Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat sepanjang periode pengamatan. Secara deskriptif, peningkatan jumlah penduduk sebagai karakteristik Kota Bekasi sebagai kawasan hunian metropolitan diduga berkaitan dengan lebih rendahnya rata-rata PDRB per kapita dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Namun, PDRB per kapita merupakan indikator rata-rata *output* ekonomi per penduduk sehingga hasil penelitian ini tidak dapat diinterpretasikan secara langsung sebagai ukuran pendapatan individu maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini tidak menguji hubungan kausal antarvariabel sehingga temuan tersebut masih bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan ekonometrika dengan menambahkan variabel kependudukan, mobilitas komuter, migrasi penduduk, struktur lapangan pekerjaan, lokasi aktivitas ekonomi, investasi, serta struktur sektor ekonomi agar faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan PDRB per kapita, termasuk dugaan peran kawasan hunian metropolitan (*urban residential trap*), dapat diuji secara empiris. Selain itu, penggunaan

data PDRB, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita yang berasal dari publikasi resmi dengan periode dan klasifikasi yang sama perlu dipastikan agar hasil analisis tetap konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

- [1] Z. Perdana Mahadi, A. Syariuddin, and D. Nuryadin, "Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan Di Jawa Barat (2011-2020): Pendekatan Panel Spasial," *Sibatik J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 1, no. 10, pp. 2039–2056, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i10.300.
- [2] M. Mulawarman, M. Manaf, and H. Saleh, "The Effect of Settlement Areas Development on Social Economy and Minimization Indication of Urban Sprawl," *Ursj*, vol. 2, no. 1, pp. 15–24, 2019.
- [3] "Kota Bekasi Dalam Angka 2026," 2026. doi: 1102001.3275.
- [4] "Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2026," 2026.
- [5] Anggun Selfi Febriyani, Muhammad Kurniawan, and Is Susanto, "Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Jumlah Industri Besar, dan Human Capital Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Pulau Jawa dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Data Panel Tahun 2018-2023," *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah*, vol. 7, no. 8, pp. 3444–3464, 2025, doi: 10.47467/alkharaj.v7i8.8909.
- [6] M. D. Windasari, S. Ningsih, and A. Pravasanti, Yuwita, "Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja, dan Human Capital Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019," vol. 22, no. 01, pp. 387–394, 2021.
- [7] B. Novirin, "Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Pelaksanaannya di Beberapa Wilayah Indonesia," *Oikon. J. Kaji. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 60–69, 2021, doi: 10.53491/oikonomika.v2i1.111.
- [8] A. T. Sukmawati and M. H. Robertus, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Industri, PMDN, Belanja Pemerintah, Dan IPM Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Kawasan Kedungsepur Tahun 2011-2020," *Diponegoro J. Econ.*, vol. 12, no. 3, pp. 1–12, 2023.
- [9] Y. Tri, A. Nainggolan, and R. Wurarah, "Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Pengolahan dan Pertanian Terhadap Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Regional di Provinsi Papua Barat," *Lensa Ekon.*, vol. 11, no. November, pp. 24–43, 2020.
- [10] K. Paul, "Increasing Returns and Economic Geography," *J. Polit. Econ.*, vol. 99, no. 3, pp. 483–499, Jun. 1991, doi: 10.1086/261763.
- [11] P. Prastowo, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penggunaan Lahan Perkotaan Pendekatan Spatial Econometrics: Studi Kasus Perkotaan Diy, 2011," *J. Ekon. Stud. Pembang.*, vol. 17, no. 1, pp. 22–30, 2016, doi: 10.18196/jesp.17.1.2458.
- [12] A. O. Riani and D. A. Suseno, "Pengaruh Infrastruktur, Teknologi, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Per Kapita Dan Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa," *Ekuilnmi J. Ekon. Pembang.*, vol. 7, no. 1, pp. 230–239, 2025.
- [13] J. R. Harris and M. P. Todaro, "Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis," *Am. Econ. Rev.*, vol. 60, no. 1, pp. 126–142, Jun. 1970.
- [14] R. Hidayat, "Analisa Pilihan Moda Antara Mobil Pribadi, Transjakarta (Brt) Dan Krl Commuter Line Menggunakan Multinomial Logit Model Dan Latar Belakang Sosial Ekonomi Komuter (Studi Kasus : Bekasi-Jakarta Komuter)," *Reka Ruang*, vol. 1, no. 2, pp. 56–62, 2019, doi: 10.33579/rkr.v1i2.1080.
- [15] Yulikasari and M. A. Samsuddin, "Analisis Dinamis Hubungan Antara Kepadatan Penduduk, PDRBPer Kapita, dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia," *Monet. J. Ekon. dan Keuang.*, vol. 3, no. 3, pp. 352–362, 2025.
- [16] A. Syah, Z. M. Nawawi, A. N. Daulay, U. Islam, N. Sumatera, and U. Medan, "The Effect of Industrial Agglomeration, Labor Force, and Human Capital Investment on Economic Growth in Medan City In The Perspective of Islamic Economics," *Costing J. Econ. Bus. Accounting*, vol. 7, no. 1, pp. 2140–2151, 2023.
- [17] N. Tanjung, F. Arif Lubis, and J. Nasution, "Analisis Pengarug Aglomerasi Industri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Nilai Output Industri terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara," *VISA J. Vis. Ideas*, vol. 3, pp. 453–463, Jul. 2023, doi: 10.47467/visa.v3i2.4047.

- [18] D. Larasati and R. Setya Wijaya, "Peran sektor basis dalam mengurangi disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah," *e-Jurnal Perspekt. Ekon. dan Pembang. Drh.*, vol. 11, no. 2, pp. 113–126, 2022, doi: 10.22437/pdpd.v11i2.17660.
- [19] A. Z. I. Rahmadhana and A. P. Utomo, "Ketimpangan Pendapatan dan Determinan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi Tahun 2017-2020," *Semin. Nas. Off. Stat.*, vol. 2022, no. 1, pp. 823–832, 2022, doi: 10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1224.
- [20] D. Gujarati, *Econometrics By Example*, 2nd ed. London: MacMillan, 2015.
- [21] Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RSD," in *Alfabeta*, 2021.
- [22] A. Damaringtyas and N. N. Yuliarmi, "Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat," *J. Kaji. Pendidik. Ekon. dan Ilmu Ekon.*, vol. 8, no. 2, pp. 197–217, 2024.
- [23] M. P. Gayatri, S. Y. Anita, and R. F. Ramdani, "Pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2024 (Studi Pada Provinsi di Pulau Sumatera)," *JIMEA / J. Ilm. MEA (Manajemen, Ekon. dan Akuntansi)*, vol. 10, no. 1, pp. 1509–1532, 2026.
- [24] M. Pinilih, "Disparitas Pendapatan di Jawa Tengah," *e-Journal Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 8, no. 1, p. 42, 2021, doi: 10.19184/ejeba.v8i1.19231.
- [25] H. Hendrawan and Y. Yanto, "Pengaruh Tingkat Kesehatan, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Per Kapita, Ketimpangan Pendapatan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Kebahagiaan Di Indonesia," *J. Ris. Pembang.*, vol. 6, no. 1, pp. 24–38, 2023, doi: 10.36087/jrp.v6i1.149.
- [26] F. Hamzah, R. Rosyadi, and M. Kartika, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Gender Gap dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat," *J. Ekon. Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 6, no. 2, pp. 77–96, 2017.
- [27] U. Hasanah, "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pendapatan Per Kapita, Dan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan Terhadap Sektor Kesehatan Di Indonesia," *J. Ilmu Ekon. Terap.*, vol. 2, no. 1, pp. 30–43, 2017, doi: 10.20473/jiet.v2i1.5504.